

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS
AKRUAL DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN
NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

**MIRZA TILLAH
NPM: 1802110103**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 01 Februari 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

MIRZA TILLAH
NPM : 1802110103

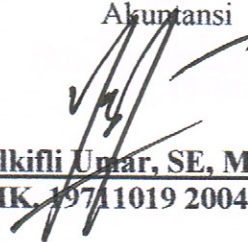
Dengan judul:

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI INSTANSI
BERBASIS DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI ACEH**

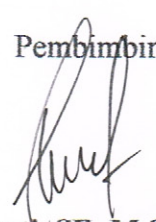
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

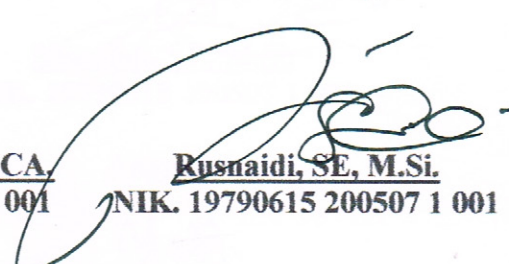
Ketua Program Studi
Akuntansi


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

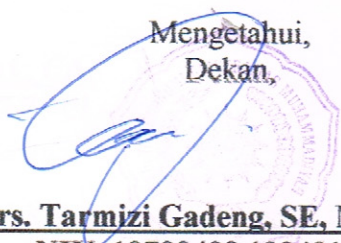
Pembimbing I


Irmawati, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19750211 200406 2 001

Pembimbing II


Rusnaldi, SE, M.Si.
NIK. 19790615 200507 1 001

Mengetahui,
Dekan,


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 01 Februari 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

MIRZA TILLAH
NPM : 1802110103

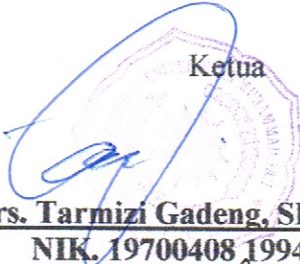
Dengan judul:

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI INSTANSI
BERBASIS DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI ACEH**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 27 Januari 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

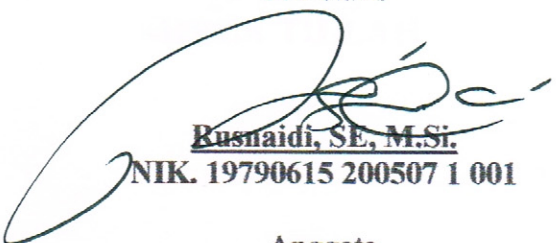
Ketua


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

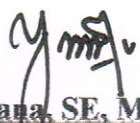
Anggota


Irmawati, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19760202 200607 2 001

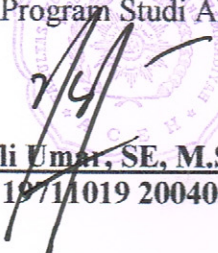
Sekretaris


Rusnaldi, SE, M.Si.
NIK. 19790615 200507 1 001

Anggota


Yusliana, SE, M.Si
NIK. 19650310 200410 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

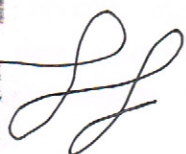

H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 01 Februari 2022
Yang Menyatakan




MIRZA TILLAH

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MIRZA TILLAH
NPM : 1802110103
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 01 Februari 2022

Banda Aceh, 01 Februari 2022
Yang Menyatakan



MIRZA TILLAH

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Standar Akuntansi Instansi Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh”**. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita dan terima kasih juga kepada saudara penulis yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
3. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA Selaku ketua Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh

4. Ibu Irmawati, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing pertama penulis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Bapak Rusnaidi, SE, M.Si selaku pembimbing kedua penulis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya staf pengajar pada Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Teman-teman angkatan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Banda Aceh, Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Landasan Teoritis	9
2.1.1 Pengertian Akuntansi.....	9
2.1.2 Sistem Akuntansi Pemerintah.....	10
2.1.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	13
2.1.4 Basis AkruaI	17
2.1.5 Penyajian Laporan Keuangan	19
2.1.6 Laporan Arus Kas	23
2.2 Penelitian Sebelumnya	25
2.3 Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	31
3.1.1. Tujuan Penelitian	32
3.1.2. Jenis Penelitian.....	32
3.1.3. Horison Penelitian	32
3.1.4. Unit Analisis.....	32
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	33
3.3 Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	35
4.1.1 Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh	35
4.1.2 Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh .	36
4.1.3 Tugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh	38

4.1.4 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.....	39
4.2. Hasil Penelitian.....	43
4.2.1 Standar Akuntansi pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh	43
4.2.2 Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI dalam Panyajian Laporan Keuangan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh	44
4.3. Pembahasan Penerapan Standar Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	55
5.2. Saran	55
DAFTAR KEPUSTAKAAN	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.3	Perbedaan Dan Persamaan Dengan Penelitian Sebelumnya.....	27
Tabel 4.1	Jumlah Realisasi Anggaran Pada BNN Provinsi Aceh.....	48
Tabel 4.2	Neraca pada BNN Provinsi Aceh.....	49
Tabel 4.3	Laporan perubahan ekuitas pada BNN Provinsi Aceh.....	50
Tabel 4.4	Laporan Operasional pada BNN Provinsi Aceh	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4.1	Struktur Organisasi BNN Provinsi Aceh	40
Gambar 4.2	Penyajian Laporan Keuangan.....	47

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS
AKRUAL DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN
NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH**

**MIRZA TILLAH
NPM: 1802110103**

Pembimbing I : Irmawati, SE, M.Si, Ak.
Pembimbing II : Rusnaldi, SE, M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis standar akuntansi instansi berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana peneliti akan melakukan observasi langsung ke lapangan dan mengumpulkan data yang akan dianalisis berdasarkan pengamatan dan pengetahuan. Yang menjadi objek penelitiannya adalah standar akuntansi instansi berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan standar akuntansi instansi berbasis akrual pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh yaitu berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas. Artinya dari tahun 2018 sampai 2020 implementasi Standar akuntansi instansi berbasis akrual pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dapat dilakukan dengan cukup baik.

Kata Kunci: *Standar Akuntansi Keuangan, Basis Akrual dan Penyajian Laporan Keuangan*

**ANALYSIS OF APPLICATION OF ACCOUNTING STANDARDS BASED
ON ACCOUNTING STANDARDS IN PRESENTING FINANCIAL
STATEMENTS AT THE NATIONAL NARCOTICS
AGENCY OF ACEH PROVINCE**

**MIRZA TILLAH
NPM: 1802110103**

Advisor I : Irmawati, SE, M.Si, Ak.

Advisor II : Rusnaldi, SE, M.Si

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze accrual-based agency accounting standards in the presentation of financial reports at the Aceh Province National Narcotics Agency. This study uses a qualitative method, where researchers will conduct direct observations in the field and collect data to be analyzed based on observations and knowledge. The object of this research is accrual-based agency accounting standards in the presentation of financial reports at the Aceh Province National Narcotics Agency. The results showed that the accrual-based agency accounting standards at the National Narcotics Agency of Aceh Province were based on the Budget Realization Report (LRA), balance sheet, operational reports, reports on changes in equity. This means that from 2018 to 2020 the implementation of accrual-based agency accounting standards at the Aceh Province National Narcotics Agency can be carried out quite well

Keywords: Financial Accounting Standards, Accrual Basis and Presentation of Financial Statements

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam perkembangan dunia ekonomi sekarang ini peranan akuntansi sangat penting untuk memutuskan sesuatu agar dalam menjalankan kegiatan tidak menimbulkan kerugian. Kegiatan yang dilakukan oleh akuntansi dalam kegiatan ekonomi mencakup kegiatan mencatat, mengikhtisarkan, melaporkan, dan menginterpretasikan data dasar ekonomi untuk kepentingan baik perorangan, perusahaan, pemerintah, dan anggota masyarakat lainnya.

Instansi pemerintah merupakan organisasi yang merupakan kumpulan orang-orang yang dipilih secara khusus untuk melakukan tugas negara sebagai bentuk pelayanan kepada orang banyak (Ihsanti, 2017). Tujuan instansi pemerintah dapat dicapai apabila mampu mengolah, menggerakkan dan menggunakan sumber daya manusia yang dimiliki secara efektif dan efisien. Dalam sebuah organisasi potensi sumber daya manusia pada dasarnya merupakan salah satu modal dan memegang peran yang paling penting dalam mencapai tujuan organisasi. organisasi perlu mengelola sumber daya manusia sebaik mungkin, sebab kunci sukses suatu organisasi bukan hanya pada keunggulan teknologi dan tersedianya dana saja akan tetapi faktor manusia bisa dikatakan sebagai sumber daya utama yang mampu mengatur, menganalisis, dan mengendalikan masalah yang ada di dalam organisasi.

Instansi pemerintahan merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain. Apabila dibandingkan dengan instansi lain, instansi

pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga politik dari pada lembaga ekonomi. Akan tetapi, sebagaimana bentuk-bentuk instansi lainnya, instansi pemerintah juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi. Instansi pemerintahan melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di satu sisi, dan di sisi lain instansi ini harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi seluruh biaya tersebut.

Tujuan dari penerapan SAP ini sebagai acuan bagi penyusun laporan keuangan pemerintahan pusat dan dalam melaksanakan tugasnya, penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan oleh pengelola keuangan tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Laporan keuangan pada hakekatnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan data keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Agar tidak salah dalam memakai informasi (laporan akuntansi) ini, maka perlu diketahui secara benar pengertian dari proses akuntansi

Lembaga pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya memerlukan jasa akuntansi, baik analisis maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan, pendidikan, dan pengelolaan keuangan untuk menghasilkan informasi yang akan digunakan.

Akuntansi demikian dikenal dengan akuntansi pemerintahan. Untuk dapat memahami pengertian yang lebih jelas mengenai Akuntansi Pemerintahan, di sini penulis mengemukakan beberapa definisi dari para ahli.

Akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Akuntansi publik merupakan seni (keterampilan) dan ilmu mengolah transaksi atau kejadian yang setidaknya-tidaknya dapat diukur dengan uang menjadi laporan keuangan yang dibutuhkan oleh para pihak yang berkepentingan atas pemerintah yang nantinya akan digunakan didalam proses pengambilan keputusan publik.

Pada tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah selesai disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP No. 71 Tahun 2010. Dalam peraturan tersebut, laporan keuangan pemerintah pusat maupun secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dan paling lambat tahun 2015 seluruh laporan keuangan pemerintah sudah menerapkan SAP berbasis akrual. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah tersebut harus mengikuti SAP sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dengan tujuan agar lebih akuntansi dan kualitas laporan keuangan tersebut semakin berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat (SKPD) bertanggung jawab sesuai dengan

wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.

Setelah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, SAP Berbasis AkruaI dipublikasikan dan didistribusikan kepada masyarakat. SAP Berbasis AkruaI diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah , dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi SAP Berbasis AkruaI harus disertai dengan upaya sinkronisasi berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah dengan SAP Berbasis AkruaI.

Penerapan basis akrual dalam atmosfir akuntansi pemerintah di Indonesia bukanlah merupakan kesukarelaan semata. Ini merupakan amanat Undang-Undang yang mengatur tentang keuangan Negara, sehingga basis akrual pada akhirnya akan diterapkan bagi seluruh entitas pelaporan dan entitas akuntansi baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah. Penerapan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan diharapkan setiap tahun semua pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah telah beralih ke basis akrual. Salah satu amanat dalam pengelolaan keuangan Negara adalah pemerintah berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksana APBN. Hal ini lebih lanjut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disusun dan disajikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut.

Hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Akuba (2018) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kota belum menerapkan standar akuntansi pemerintah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dikarenakan masih terdapat beberapa faktor yang masih mempengaruhi penerapannya dan pemerintah kota tersebut masih menerapkan PP No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Namun berbeda hasil penelitian dari Lamonisi (2018) yaitu menunjukkan pemerintah kota dalam menerapkan SAP berbasis akrual telah melaksanakan berbagai pelatihan-pelatihan. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah termasuk pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Badan Narkotika Nasional diketahui bahwa Badan Narkotika Nasional adalah instansi vertikal yang menggunakan anggaran APBN dalam melaksanakan kegiatannya. Oleh karena itu, Badan Narkotika Nasional merupakan instansi yang termasuk dalam ruang lingkup SAPP dalam penerapan prosedur sistem akuntansinya dan hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Badan Narkotika Nasional mulai tahun 2015 ini telah menerapkan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dalam menyusun laporan keuangan. Penerapannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat. Namun sistem tersebut masih terdapat beberapa kekurangan seperti yang dinyatakan dalam PMK 270/PMK.05/2014 bahwa SAIBA ini masih merupakan aplikasi yang digunakan dalam masa transisi dan masih perlu penyempurnaan.

Standar akuntansi instansi berbasis akrual yang belum sempurna disebabkan beberapa faktor, salah satu faktor disebabkan karena target pencapaian dalam penyajian laporan keuangan atau pengelolaan laporan keuangan tidak mencapai target serta semakin lama tingkat persentase pencapaian kinerja semakin menurun, artinya kinerja mereka semakin lemah/menurun atau kompetensi sumber daya manusia masih rendah dan kurangnya pengawasan dari pimpinan terhadap kinerja pegawai. Selain itu, faktor perencanaan dan penyusunan kerja yang kurang tepat dengan sasaran kerja yang telah direncanakan sebelumnya baik itu masalah dalam penyajian laporan keuangan, pengelolaan laporan keuangan atau perencanaan anggaran.

Hal yang belum mencapai target seperti dalam meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaksanaan kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan dan melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia. Akibatnya, penilaian keberhasilan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh juga tidak seragam. Hal itu untuk mencapai sasaran program yang akan dilaksanakan oleh suatu unit organisasi. Konsep sebagaimana disebutkan di atas akan terwujud dengan baik, bila diterapkan klasifikasi anggaran berdasarkan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Standar akuntansi instansi Berbasis Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah standar akuntansi instansi berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis standar akuntansi instansi berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang terkait serta langsung didalamnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis di bidang keuangan khususnya mengenai standar akuntansi instansi berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan
- b. Sebagai referensi bagi penelitian sejenis yang akan dilakukan dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi dengan judul sistem akuntansi instansi berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Penelitian ini dilakukan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Hery (2018:7) menyatakan bahwa akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Akuntansi juga sering dianggap sebagai bahasa bisnis, dimana informasi bisnis dikomunikasikan kepada *stakeholders* melalui laporan akuntansi. Mula-mula sebuah transaksi bisnis akan diidentifikasi (dianalisis), dicatat, dan barulah dilaporkan lewat laporan akuntansi yang merupakan media komunikasi informasi akuntansi.

Sumarsan (2018:2) menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga menghasilkan informasi, yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan.

Harrison (2018:3) menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi, yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis. Selain itu, akuntansi juga merupakan *bahasa bisnis*. Semakin baik anda memahami bahasa tersebut, semakin baik mengelola keuangan dan bisnis. Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa

ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan. Salah satu unsur vital dalam mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi adalah kemampuan akuntan untuk menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang telah dilaporkan. Analisis meliputi penggunaan rasio, persentase, grafik, dan diagram untuk menyoroti tren-tren dan hubungan keuangan yang signifikan.

2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintah

Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Kusumah (2017:4), selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah merevisi PP No.24 Tahun 2005 dengan mengeluarkan PP no. 71 Tahun 2010 tentang SAP yang berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/ aset yang lebih transparan dan akuntabel.

Mahsun, *et. al* (2018: 65) menjelaskan standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sudah menetapkan standar akuntansi untuk pemerintah yang disebut dengan SAP (Standar akuntansi pemerintah). Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan yang berkualitas.

Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan (PP No. 71 Tahun 2010). Dengan ditetapkannya SAP, diharapkan dapat terciptanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik

(*good governance*). Standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan sendiri perlu dikembangkan untuk memperbaiki praktik akuntansi keuangan pada lingkungan organisasi pemerintahan (Mahmudi, 2018: 271).

Standar akuntansi berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi. Para pengguna laporan keuangan di luar organisasi akan dapat memahami informasi yang disajikan jika disajikan dengan kriteria/persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusun laporan keuangan. Bagi auditor, khususnya eksternal auditor, SAP digunakan sebagai kriteria dalam menilai informasi yang disajikan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. SAP merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan entitas pemerintah, baik pemerintah pusat dan juga pemerintah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit. Dengan demikian SAP menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor, (Abas, 2017).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan negara yang memenuhi

prinsip tepat waktu, dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum (Dagong, 2017:9).

Menurut Hidayatullah, (2017) standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dengan menerapkan SAP Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN. SAP berbasis akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi pemerintahan pusat dan dalam melaksanakan tugasnya, penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Lasoma, 2017:2)

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun (Komaruddin, 2016:2). Indikator Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Komaruddin (2016:4) adalah sebagai berikut:

1. Penyajian Laporan Keuangan
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan arus kas
4. Catatan atas laporan keuangan
5. Akuntansi persediaan
6. Akuntansi investasi
7. Akuntansi aset tetap
8. Akuntansi aset tetap

9. Akuntansi kewajiban
10. Koreksi kesalahan
11. Laporan keuangan konsolidasi

2.1.3 Sistem Akuntansi Keuangan

Pengaturan pengelolaan anggaran yang dapat mengacu pada ketentuan perundang-undangan pada UU Nomor 71 Tahun 2003 tentang keuangan Negara menjelaskan bahwa Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan tanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Ketentuan perundang-undangan tersebut secara limitatif telah menjelaskan siklus pengelolaan keuangan Negara/ yang dimulai dari: Perencanaan, Pembahasan, Pengesahan, Penatausahaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban.

Menurut Peraturan menteri dalam negeri No. 21 tahun 2011, Sistem akuntansi keuangan didefinisikan adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengihkti-saran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Sistem akuntansi keuangan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut (UU No. 17, 2003). Untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan segala aspek keuangan yang terdapat didalamnya maka setiap kepala harus dapat melakukan pengelolaan keuangan yang baik sesuai dalam permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan, yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan (Permendagri No. 13, 2006).

Dalam menghasilkan laporan yang berkualitas maka setiap entitas harus membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum atau dalam internasional dikenal dengan *International Accounting Standards Board* (IASB) yang sekarang disebut dengan *International Financial Reporting Standar* (IFRS) sebagai prasyarat dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dalam perusahaan. Sama halnya dengan perusahaan, pemerintah juga harus dapat menghasilkan laporan keuangan dengan mengacu standar yang berlaku dalam pemerintahan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan baik (Defitri, 2018:68)

Oleh karena itu anggaran yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun haruslah dapat memenuhi keinginan masyarakat, karena bagaimanapun pemerintah merupakan pelayan masyarakat, hal ini disebabkan oleh peran penting dalam mewujudkan optimalisasi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat merupakan tujuan penting dari keberadaan organisasi pemerintah (Siswadhi, 2017). Dengan demikian pemerintah ataupun pemerintah harus dapat merencanakan dan menyelenggarakan program-program kerja yang tujuan akhirnya adalah menciptakan kepuasan masyarakat yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan akan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan.

Kegunaan sistem akuntansi keuangan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Hal ini disebabkan bahwa sistem akuntansi keuangan merupakan sistem yang mendokumentasikan, serta mengolah keuangan dan data terkait mulai dari

proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan menjadi informasi keuangan yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban (Herawati, 2017).

Sistem akuntansi keuangan merupakan salah satu sub sistem organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah . Ruang lingkup sistem akuntansi keuangan mencakup kebijakan sistem akuntansi, prosedur sistem akuntansi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi (Defitri, 2018:68) bahwa sistem akuntansi keuangan yang berjalan efektif akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga hasil penelitian Wati dkk (Wati, Herawati, & Sinarwati, 2017) yang memberikan informasi bahwa sistem akuntansi keuangan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan demikian jika sistem keuangan diterapkan dengan baik dari awal maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin lebih baik.

Keuangan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, yang dimaksud secara tertib adalah bahwa keuangan dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya pengelolaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan dan efektif serta efisien maka akan dapat menghasilkan suatu pelaporan yang baik dan taat dengan ketentuan karena didukung dengan bukti-bukti yang kuat.

Dengan menggunakan sistem akuntansi, maka resiko akan terjadinya suatu kekeliruan dan kesalahan dapat diminimalisir dalam pencatatan atau perhitungan yang dapat memungkinkan pemerintah mengalami resiko yang lebih berat. Romney (2018:3) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi terdiri dari lima komponen:

1. Orang-orang, yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi.
2. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi.
3. Data, tentang proses-proses bisnis organisasi.
4. *Software*, yang dipakai untuk memproses data organisasi.
5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk computer, peralatan pendukung (*peripheral device*), dan peralatan untuk komunikasi jaringan.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatan, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Menurut Peraturan Pemerintah R.I Nomor 71 Tahun 2010 berikut ini adalah prinsip-prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah :

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikan laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

2. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

3. Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka

pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain disebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitas. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

6. Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik disbanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2.1.4 Basis Akrual

Menurut Peraturan Pemerintah R.I Nomor 71 Tahun 2010 basis akuntansi merupakan salah satu prinsip dalam akuntansi yang digunakan untuk menentukan periode pengakuan dan pengukuran suatu transaksi ekonomi dalam laporan keuangan. Sebagaimana diketahui bahwa hasil akhir sebuah siklus, akuntansi adalah laporan keuangan, maka basis akuntansi menjadi sangat penting karena akan mengisi angka dalam konten pada laporan keuangan yang merupakan ujung dan siklus

akuntansi tersebut. Laporan keuangan dimaksud selanjutnya akan menjadi informasi sebagai pijakan untuk pengambilan keputusan yang bermutu. Basis akuntansi yang pernah digunakan di pemerintahan, yaitu basis kas, basis kas menuju akrual dan basis akrual.

Menurut *International Federation of Accountants* (IFAC) terdapat beberapa kelebihan sekaligus kekurangan dalam penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan. Kelebihan penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan, antara lain (Rahmawati, 2018:4):

1. Memberikan gambaran bagaimana pemerintah membiayai aktivitas-aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan pendanaannya;
2. Memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini;
3. Menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya;
4. Menyediakan ruang bagi pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya;
5. Memberikan manfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifitas serta pencapaian hasil akhir atas penggunaan sumber daya yang dikelolanya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Lamonisi (2016: 3) menyimpulkan bahwa basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam

pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN.

2.1.5 Penyajian Laporan Keuangan

2.1.5.1 Pengertian Penyajian Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2018:7) “Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau pada periode tertentu. Menurut Harahap (2016:105), laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun laporan keuangan yang lazim dikenal adalah laba/rugi atau hasil usaha, neraca, laporan arus kas dan laporan perubahan posisi keuangan.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain (Ihsanti, 2017:5). Menurut Harahap (2018:190), Analisis laporan keuangan berarti menguraikan akun-akun laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara yang satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi

kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Namun demikian perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan (Ihsanti, 2017:6).

Menurut Yosefrinaldi (2018), rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah dapat disebabkan oleh kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi. Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting ada-lah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi

Karakteristik kualitas informasi keuangan menurut SAP yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Perubahan akuntansi berbasis kas menjadi akrual bukan sekedar masalah teknis pencatatan transaksi dan menyajikan laporan keuangan, tetapi membutuhkan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), serta mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Oleh karenanya, proses pelaporan keuangan pemerintah harus dikerjakan oleh SDM

yang memiliki kompetensi agar mampu menyusun dan menyajikan LKPD yang berkualitas.

2.1.5.2 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2017) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi.
2. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas kegunaan sumber - sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi : aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuangtungan dan kerugian dan arus kas.

Tujuan laporan keuangan berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia dalam Harahap (2018) adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan;
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba;
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba;
4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi;
5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 189 sampai dengan Pasal 193, pelaporan keuangan pemerintah diatur sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.
2. Laporan Perubahan SAL (LP SAL)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.
4. Laporan Operasional (LO)
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/ untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pospos luar biasa.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
6. Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Laporan arus kas menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/ selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan keuangan. Adapun laporan keuangan yang dimaksud yaitu Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, juga berisi ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan

keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

2.1.6 Laporan Arus Kas

Menurut Skousen, *et. al* (2018:284) Laporan arus kas itu sendiri didefinisikan “Laporan arus kas (*statement of cash flow*) adalah laporan keuangan yang melaporkan jumlah kas yang diterima dan dibayar oleh suatu perusahaan selama periode tertentu”. Kas adalah salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya”. Menurut Kasmir (2018: 140), “rasio ini perputaran kas berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan”. Menurut Riyanto (2018:95) “perputaran kas adalah perbandingan antara jualan dengan jumlah kas rata-rata.

Perputaran kas merupakan kemampuan kas dalam menghasilkan pendapatan sehingga dapat dilihat berapa kali uang kas berputar dalam satu periode tertentu. Semakin tinggi tingkat perputaran kas berarti berarti semakin efisien tingkat penggunaan kasnya dan sebaliknya semakin rendah tingkat perputarannya semakin tidak efisien, karena semakin banyaknya uang yang berhenti atau tidak dipergunakan (Febriani, 2017:7).

Untuk menentukan berapa jumlah kas yang sebaliknya harus dipertahankan dalam perusahaan, belum ada standart rasio yang bersifat umum. Meskipun demikian ada beberapa standart tertentu yang dapat digunakan sebagai pedoman didalam menentukan jumlah kas yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan. Jumlah kas pada suatu saat dapat dipertahankan dengan besarnya jumlah aktiva lancar ataupun utang lancer (Hardiyanto, 2016:12).

Kas merupakan uang tunai yang dimiliki perusahaan dan dapat digunakan setiap saat. Kas merupakan komponen aktiva lancar paling dibutuhkan guna membayar berbagai kebutuhan yang diperlukan. Jumlah uang kas yang ada di perusahaan harus diatur sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Apabila uang kas terlalu banyak, sedangkan penggunaannya kurang efektif, akan terjadi uang menganggur dalam perusahaan (Kasmir, 2018: 40).

Kas merupakan uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, termasuk dalam pengertian kas adalah cek yang diterima dari para pelanggan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau *demand deposit*, yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali dengan menggunakan cek atau bilyet (Munawir, 2018:14). Kas adalah uang dan surat berharga lainnya yang dapat diuangkan setiap saat serta surat berharga lainnya yang bersifat sangat lancar yang memenuhi syarat antara lain, setiap saat dapat diukur menjadi kas, tanggal jatuh temponya sangat dekat, kecil resiko perubahan nilai yang disebabkan perubahan tingkat harga (Hardiyanto, 2016:9).

Laporan arus kas mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan (*principal revenue-producing activities*) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang bukan termasuk setara kas. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan (Febriani, 2017:7).

Laporan arus kas merupakan suatu laporan yang memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan pada suatu periode waktu tertentu dengan mengklasifikasikan transaksi pada kegiatan operasi, pembiayaan, dan investasi. (Harahap, 2018:257). Sedangkan menurut Skousen *et. al* (2018: 284) Laporan arus kas itu sendiri didefinisikan : “Laporan arus kas (*statement of cash flow*) adalah laporan keuangan yang melaporkan jumlah kas yang diterima dan dibayar oleh suatu perusahaan selama periode tertentu”.

Menurut Kasmir, (2018:141) rasio perputaran kas (*cash turnover*) berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Apabila rasio perputaran kas tinggi, ini berarti ketidakmampuan perusahaan dalam membayar tagihannya. Sebaliknya apabila rasio perputaran kas rendah, dapat diartikan kas yang tertanam pada aktiva yang sulit dicairkan dalam waktu singkat sehingga perusahaan harus bekerja keras dengan kas yang lebih sedikit.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian dari Lamonisi (2018) dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Tomohon” Hasil penelitian menunjukkan pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan SAP berbasis akrual telah melaksanakan berbagai pelatihan-pelatihan. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah termasuk pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

Selanjutnya penelitian dari Akuba (2018) dengan judul penelitian “Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo belum menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dikarenakan masih terdapat beberapa faktor yang masih mempengaruhi penerapannya. Pemerintah Kota Gorontalo masih menerapkan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Kemudian penelitian dari Rahmawati (2018) dengan judul “Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010”. Hasil data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang dikembangkan berdasarkan paradigma deskriptif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Malang telah memahami standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Implementasi laporan keuangan berbasis akrual akan dilaksanakan penuh oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2018.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lubis (2017) dengan judul Standar akuntansi instansi berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan Di Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa pada laporan keuangan dan laporan anggaran tahun 2018 Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara telah mampu menerapkan full atau sepenuhnya standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Laporan keuangan yang akan dihasilkan Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun

2010 menjadi bertambah kuantitasnya menjadi 7 laporan yaitu; laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Penelitian dari Arif (2017) dengan judul Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Studi pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso). Hasil penelitian bahwa Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada prinsipnya mempunyai komitmen untuk menerapkan SAP akrual yang diatur dalam PP No. 71 tahun 2010. Dalam hal sarana dan prasarana serta sistem informasi telah dilakukan beberapa persiapan untuk mendukung pelaksanaan SAP tersebut. Sedangkan untuk SDM, Pemkab Bondowoso pada tahun 2017 akan melaksanakan transfer knowledge dalam rangka persiapan tersebut. Untuk lebih jelas penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Judul dan nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kota Tomohon (Lamonisi, 2018)	– Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan SAP berbasis akrual telah melaksanakan berbagai pelatihan-pelatihan. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual yang mewajibkan untuk semua pemerintah termasuk pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan SAP berbasis akrual.	– Sama-sama meneliti tentang Penerapan standar akuntansi berbasis akrual – Teknik analisis data – Teknik pengumpulan data	– Tempat penelitian – Tahun penelitian –

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Judul dan nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
2	Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo (Akuba, 2018)	– Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo belum menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dikarenakan masih terdapat beberapa faktor yang masih mempengaruhi penerapannya. Pemerintah Kota Gorontalo masih menerapkan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah	– Sama-sama meneliti tentang Penerapan standar akuntansi berbasis akrual – Teknik analisis data – Teknik pengumpulan data	– Tempat penelitian – Tahun penelitian
3	Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Rahmawatia, 2018)	– Metode Kualitatif	Hasil data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang dikembangkan berdasarkan paradigma deskriptif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Malang telah memahami standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.	– Sama-sama meneliti tentang standar akuntansi – Teknik analisis data – Teknik pengumpulan data	– Tempat penelitian – Tahun penelitian
4	Standar akuntansi instansi berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan Di Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara (Lubis, 2017)	– Metode Kualitatif	Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa pada laporan keuangan dan laporan anggaran tahun 2018 Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara telah mampu menerapkan penuh atau sepenuhnya standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010.	– Sama-sama meneliti tentang Penerapan standar akuntansi berbasis akrual	– Tempat penelitian – Tahun penelitian

Tabel 2.1 Lanjutan

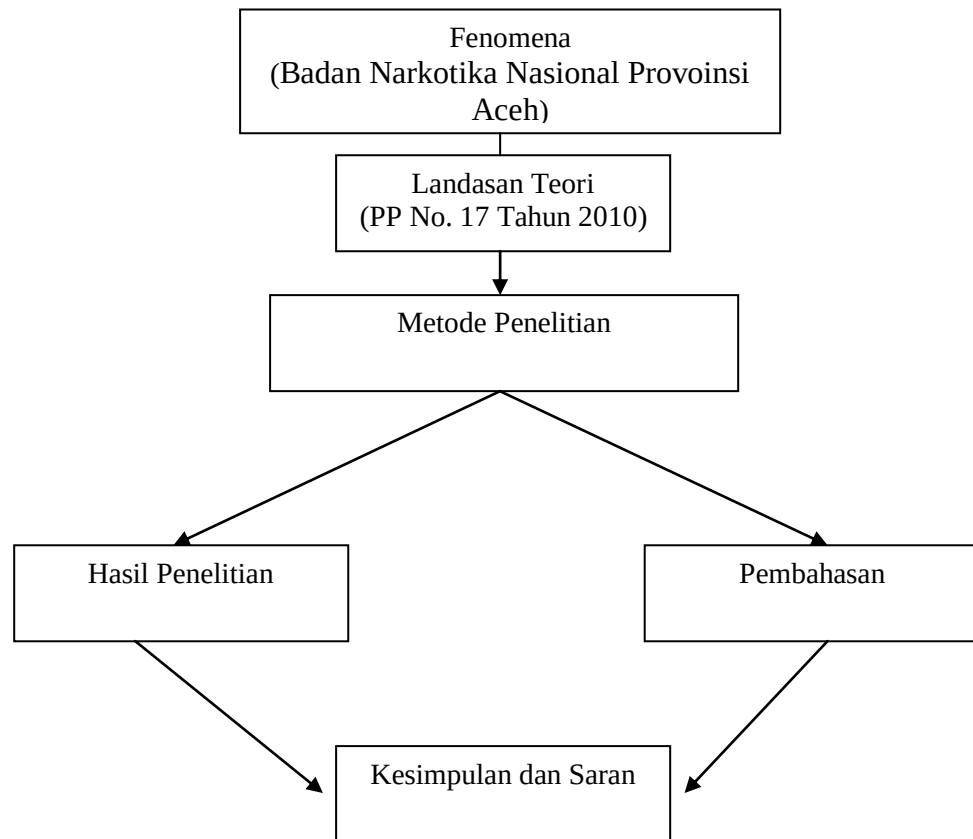
No	Judul dan nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
2	Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Studi pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso) (Arif, 2017)	– Metode Kualitatif	Hasil penelitian bahwa Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada prinsipnya mempunyai komitmen untuk menerapkan SAP akrual yang diatur dalam PP No. 71 tahun 2010. Dalam hal sarana dan prasarana serta sistem informasi telah dilakukan beberapa persiapan untuk mendukung pelaksanaan SAP tersebut.	– Sama-sama meneliti tentang Penerapan standar akuntansi berbasis akrual – Teknik analisis data – Teknik pengumpulan data –	– Tempat penelitian – Tahun penelitian –

Sumber: Data diolah (2021)

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual pada penelitian ini memberikan gambaran tentang sistem akuntansi keuangan. Dengan adanya kerangka konseptual ini akan memberikan kemudahan kepada peneliti dalam memecahkan masalah penelitian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terhadap objek masalah penelitian. Berikut adalah kerangka konseptual yang dibangun dalam memecahkan masalah dalam penelitian. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.2;

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah. 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rencana dan struktur penelitian yang dibuat sedemikian rupa untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Rencana Menurut Sekaran (2017:152) desain penelitian adalah rencana struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien, dan efektif. Desain penelitian dapat meliputi beberapa elemen yaitu;

3.1.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui fenomena atau permasalahan yang terjadi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh khususnya mengenai sistem akuntansi keuangan . Untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan skripsi ini, penelitian dilakukan secara langsung pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Yang menjadi objek penelitiannya adalah Standar akuntansi instansi berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

3.1.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana peneliti akan melakukan observasi langsung ke lapangan dan mengumpulkan data yang akan dianalisis berdasarkan pengamatan dan pengetahuan. Pengamatan atau observasi merupakan suatu unsur penting dalam penelitian kualitatif, observasi dalam konsep yang sederhana adalah sebuah proses atau kegiatan awal yang dilakukan oleh peneliti

untuk bisa mengetahui kondisi, realitas lapangan penelitian. Sugiyono (2018:21) Observasi dalam penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.

3.1.3. Horizon Waktu

Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi data panel. Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan dari data *time series* (runtut waktu) dan *cross section* (seksi silang) (Winarno, 2017). Data yang dikumpulkan hanya sekali periode yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan keuangan. Keunggulan dari penggunaan data panel salah satunya adalah dapat memberikan data yang lebih informatif dan lebih baik dalam mendeteksi dan mengatur efek yang tidak dapat diamati dalam data *time series* dan *cross section*.

3.1.4. Unit Analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data. Sugiyono (2018:21) Unit analisis Individual adalah data yang dikumpulkan dari setiap individu unit. Jika peneliti berminat mempelajari interaksi dua orang maka dikenal sebagai unit analisis pasangan (*dyads*). Peneliti memutuskan unit analisis yang merumuskan pertanyaan penelitian karena metode pengumpulan data ditentukan informasi pengamatan secara langsung sebagai data untuk analisis dalam penelitian ini. Unit analisis dalam penelitian ini adalah unit individu Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun laporan tugas akhir ini penulis memerlukan data yang terbagi atas berbagai macam, meliputi :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dan merupakan data yang bisa diolah dan belum diolah oleh pihak lain, yang termasuk data primer berupa interview atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait

Teknik Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara penelitian Lapangan (*Fild Research*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung ke objek penelitian.

- a. Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pimpinan untuk mengetahui sejarah, struktur organisasi, sistem akuntansi keuangan , serta cara mengatasi masalah yang timbul.

- b. Observasi

Pengamatan dan pencatatan secara sistematis dengan melihat prosedur yang terjadi.

- c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data-data berupa laporan keuangan mengenai realisasi anggaran.

3.3 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan dan diolah dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif yaitu suatu metode analisa yang membandingkan tinjauan teoritis dengan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian mengambil kesimpulan dan memberi saran. Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2018:21) adalah sebagai berikut: “Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Hasil penelitian ini diperoleh dengan teknik mendalam mengenai penerapan standar akuntansi berbasis akrual sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi langsung dilapangan yang kemudian peneliti analisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNPA) mempunyai peran dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, dan prekursor (zat atau bahan pemula yang digunakan untuk membuat narkoba). Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba juga prekursor narkoba.

BNNP Aceh secara struktural baru lahir pada tanggal 20 April 2011 yaitu dengan dilantiknya kepala BNNP Aceh, sedangkan jabatan struktural eselon III/a dan eselon IV/a baru dilantik pada tanggal 5 Juli 2011 yang dibentuk berdasarkan peraturan kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER atau 04 atau V atau 2010 atau BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Aceh berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Narkotika Nasional.

Mengingat BNNP Aceh merupakan lembaga instansi vertikal yang masih baru, maka untuk mendukung kehadiran dan pelaksanaan tugas dan wewenang di Propinsi Aceh telah turut dibantu oleh pemerintah Aceh sesuai perjanjian kerjasama antara Gubernur Aceh dan kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yaitu:

1. Surat perjanjian kerjasama antara Gubernur Aceh dengan Badan Narkotika Nasional nomor: 10 atau PKS atau 2011 tanggal 20 April 2011 tentang pelaksanaan percepatan pengembangan dan pembangunan kapasitas Badan Narkotika Nasional di Aceh.
2. Surat nota kesepahaman antara Gubernur Aceh dengan Badan Narkotika Nasional Nomor: 03-MoU-2011 tanggal 20 April 2011 tentang kerjasama pelaksanaan percepatan pengembangan dan pembangunan kapasitas Badan Narkotika Nasional di Aceh

4.1.2 Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

Untuk menentukan arah bagi pelaksanaan P4GN, BNN merumuskan rencana strategi yang mengacu pada tujuan pembangunan nasional terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, serta nawacita presiden yaitu perwujudan sistem penegakan hukum yang berkeadilan melalui penekanan antara lain:

1. Mendorong BNN untuk memfokuskan operasi pemberantasan narkoba dan psikotropika terutama bersumber pada produsen dan transaksi bahan baku narkoba dan psikotropika nasional maupun internasional.
2. Mendukung upaya program percepatan Indonesia bebas narkoba melalui sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat umum yang dilakukan secara terus menerus, dan memberikan pengetahuan mengenai bahaya narkoba kepada siswa sejak sekolah dasar sampai dengan mahasiswa.
3. Menyiapkan sarana dan anggaran yang memadai bagi rehabilitasi pengguna narkoba.

Adapun visi, dan misi, dan sasaran strategis yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja BNN adalah :

1. Visi: mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Misi: menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Visi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh adalah menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh koponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia. Sedangkan misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba)
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden.

4.1.3 Tugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala.

Tugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;

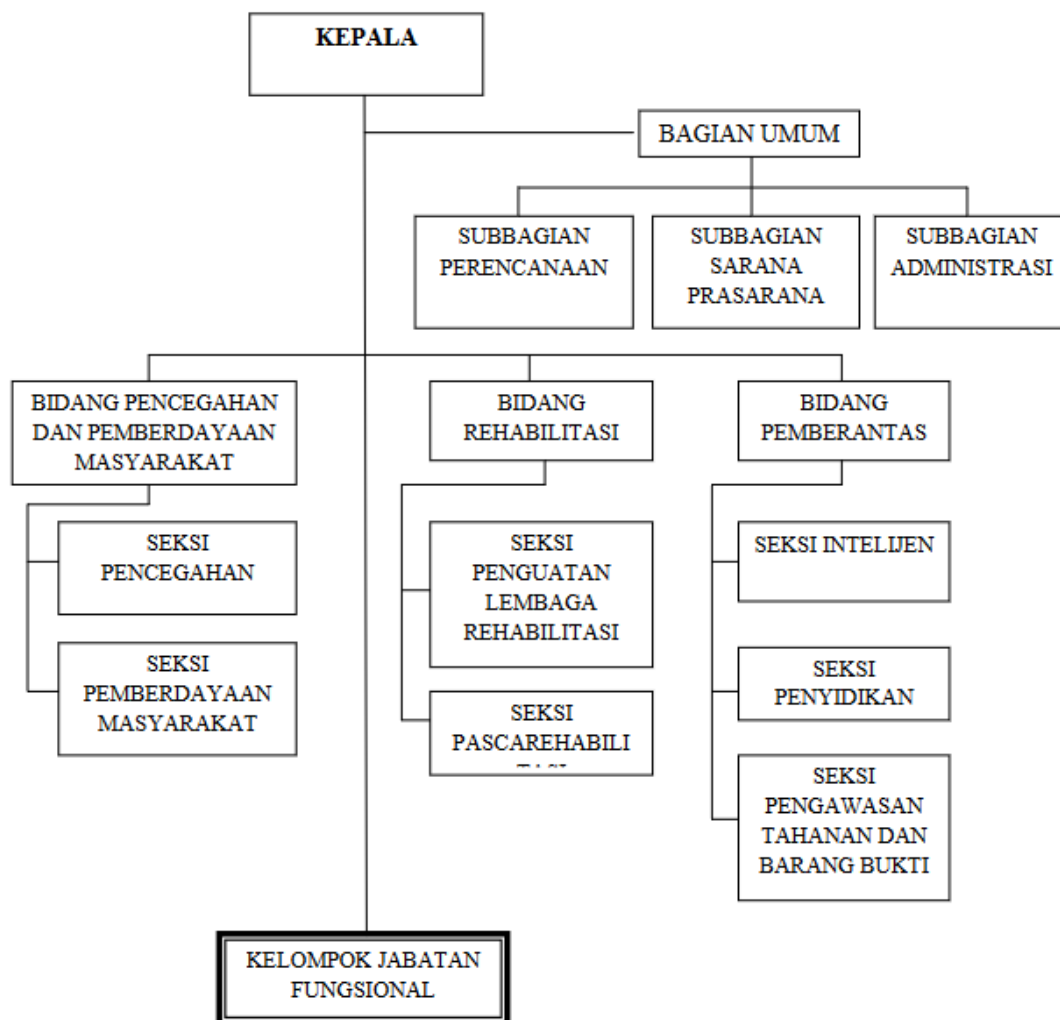
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

4.1.4 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

Struktur organisasi baik Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dapat dilihat dari bagan organisasi dari Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor Per / 4 / V / 2010 / BNN tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Struktur BNNP Aceh sesuai dengan peraturan kepala BNN: Perka nomor 3 tahun 2015.

1. Kepala
2. Bagian Tata Usaha
3. Bidang Pencegahan
4. Bidang pemberdayaan Masyarakat dan
5. Bidang Pemberantasan

Struktur Organisasi pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut:



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

Sumber: Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (2021)

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Fungsi :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika

dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.

2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat.
13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.

21. Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Penerapan Standar Akuntansi pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

Standar akuntansi pemerintah Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sudah menetapkan standar akuntansi untuk pemerintah yang disebut dengan SAP (standar akuntansi pemerintah). Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Kehadiran standar akuntansi instansi berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dinilai sedikit menyulitkan hal tersebut berangkat dari kendala yang dihadapi yaitu sumber daya manusia. Rendahnya pelatihan yang di adakan menjadi salah kendala bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan berbasis akrual.

Kemudian yang menjadi hambatan bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dari sistem informasi, sumber daya manusia, strategi dasar yang dapat dipergunakan untuk Standar akuntansi instansi berbasis akrual dalam penyajian

laporan keuangan yaitu dengan mengandalkan sumber daya manusia yang memahami regulasi di bidang keuangan dan akuntansi. Dimana pengelolaan sumber daya manusia berarti penyiapan dan pelaksanaan suatu rencana yang terkoordinasi untuk menjamin bahwa sumber daya manusia yang ada dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh tersebut, misalnya infrastruktur

Penggunaan akuntansi akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern (sektor publik) yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya (*cost*) pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekadar basis kas. Secara umum, akuntansi akrual telah diterapkan di negara-negara yang lebih dahulu melakukan reformasi manajemen publik. Tujuan kuncinya adalah untuk meminta pertanggungjawaban para manajer dari sisi keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan pada saat yang sama melonggarkan kontrol atas masukan (*input*). Para manajer di sektor publik diminta agar bertanggung jawab untuk seluruh biaya yang berhubungan dengan *output/outcome* yang dihasilkannya, tidak sekadar dari sisi pengeluaran kas. Dengan demikian akuntansi akrual dapat mendukung pengambilan keputusan oleh para manajer secara efisien dan efektif.

PP Nomor 71 Tahun 2010, yang merupakan peraturan yang menetapkan Standar akuntansi instansi berbasis akrual yang disusun dengan berlandaskan pada penggunaan basis akrual (*accrual*). PSAP berbasis akrual disajikan pada lampiran 1 sampai dengan 12 Pernyataan Standar akuntansi instansi berbasis akrual (PSAP) yang dengan diawali dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Dalam akuntansi akrual ini, entitas pelaporan harus dapat menyajikan 7 (tujuh) jenis laporan

keuangan. Dalam PSAP berbasis akrual, laporan keuangan dikelompokkan ke dalam dua kelompok laporan yaitu laporan pelaksanaan anggaran yang masih menggunakan basis kas dan kelompok laporan finansial yang sudah menggunakan basis akrual. Dalam laporan finansial terdapat laporan operasional yaitu laporan pelaksanaan anggaran yang disajikan dengan menggunakan basis akrual.

SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

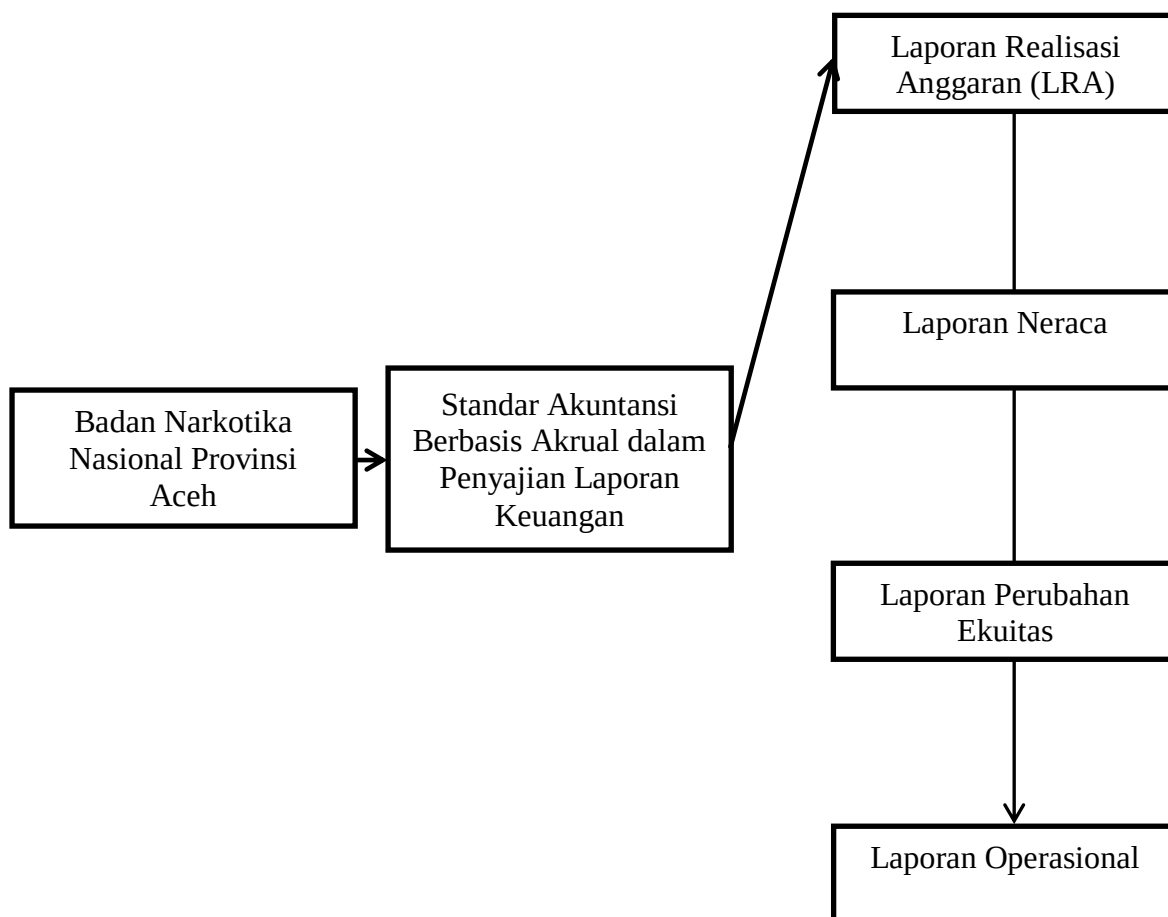
4.2.2 Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual dalam Penyajian Laporan

Keuangan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

Akrual basis Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh merupakan penyandingan pendapatan dan biaya pada periode disaat terjadinya, bukan pencatatan pada saat pendapatan tersebut diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan. Akuntansi berbasis akrual selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah hutang dan piutang organisasi. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih akurat atau kondisi keuangan organisasi daripada akuntansi berbasis kas. Namun, jelas bahwa catatan menggunakan basis akrual lebih kompleks daripada basis kas. Lebih jauh lagi, basis akrual mendukung penggunaan anggaran sebagai teknik pengendalian

Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi instansi berbasis akrual lainnya. Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, neraca dan belanja modal, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Urutan penyajian laporan keuangan dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Gambar 4.2
Penyajian Laporan Keuangan

Sumber: Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (2021)

1. Laporan Realisasi Anggaran

Unsur-unsur laporan realisasi anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam basis akrual: yaitu dengan Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Kemudian belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode

tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dan realisasi dari tahun 2018 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini;

Tabel 4.1
Jumlah Realisasi Anggaran pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

No	Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase/ Rasio (%)	Keterangan
1	2018	32.325.864.000	30.164.034.132	2.161.829.868	93,31%	Efektif
2	2019	33.085.790.000	31.917.614.994	1.168.175.006	96,47%	Efektif
3	2020	35.341.533.000	31.822.683.006	3.518.849.994	90,04%	Efektif

Sumber: Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah suflus realisasi anggaran atau tingkat persentase rasio pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami peningkatan dan penurunan dimana di tahun 2018 memiliki suflus realisasi anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh sebesar Rp 2.161.829.868 dengan tingkat rasio 93,31%, kemudian pada tahun 2019 suflus anggaran mengalami peningkatan di bandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar Rp 1.168.175.006 dengan rasio 96,47%. Pada tahun 2020 suflus realisasi anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp 3.518.849.994 dengan rasio 90,04% (laporan realisasi anggaran pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh secara rinci dapat dilihat pada lampiran).

2. Laporan Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca BNN Provinsi Aceh pada dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 4.2
Neraca pada BNN Provinsi Aceh

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Jumlah aset tetap	317.903.470	34.891.208.193	32.926.282.331
2	Aset lainnya	228.957.998	210.859.907	196.930.150
3	Kewajiban	31.542.118	81.837.599	35.516.098
4	Kawajiban jangka pendek	31.542.118	81.837.599	35.516.098
5	Kewajiban jangka panjang	-	-	-
6	Ekuitas	39.041.193.284	35.359.026.679	33.582.142.937
7	Jumlah kewajiban dan ekuitas dana	39.072.735.402	35.440.864.278	33.617.659.035

Sumber: BNN Provinsi Aceh (2021)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah aset tetap pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh tahun 2018 sebesar Rp 317.903.470, kemudian tahun 2019 sebesar Rp 34.891.208.193 dan jumlah aset tetap pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh tahun 2020 sebesar Rp 32.926.282.331 dan aset lainnya di tahun 2018 sebesar Rp 228.957.998. Kemudian jumlah kewajiban pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh tahun 2018 sebesar Rp 31.542.118, tahun 2019 sebesar Rp 81.837.599 dan jumlah kewajiban pada tahun 2020 sebesar Rp 31.542.118. Jumlah kawajiban jangka pendek pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh tahun 2018 sebesar Rp 31.542.118, tahun 2019 sebesar Rp 81.837.599 dan tahun 2020 sebesar Rp 39.072.735.402..

Selain itu, jumlah kewajiban dan ekuitas dana pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh tahun 2018 sebesar Rp 39.072.735.402, kemudian tahun 2019 sebesar Rp 35.440.864.278 dan jumlah kewajiban dan ekuitas dana Badan Narkotika

Nasional Provinsi Aceh pada tahun 2020 sebesar Rp 33.617.659.035. Dapat disimpulkan bahwa jumlah kewajiban dan ekuitas dana pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh pada setiap tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Tujuan menggunakan neraca pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk mengukur jumlah aset tetap, aset lainnya, kewajiban, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, ekuitas dan jumlah kewajiban dan ekuitas dana. (Jurnal neraca pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh secara rinci dapat dilihat pada lampiran).

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Laporan perubahan ekuitas pada dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 4.3
Laporan Perubahan Ekuitas pada BNN Provinsi Aceh

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Ekuitas awal	23.341.592.437	39.041.193.284	35.359.026.679
2	Surplus/ Defisit-LO	(33.221.188.608)	(36.891.484.357)	(34.547.611.849)
3	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar			
4	Koreksi nilai persediaan	-	-	-
5	Selisih revaluasi aset tetap	-	-	-
6	Lain-lain	-	-	-
7	Ekuitas akhir	39.041.193.284	35.359.026.679	33.582.142.937

Sumber: BNN Provinsi Aceh (2021)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dijelaskan bahwa ekuitas awal pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh tahun 2018 sebesar Rp 23.341.592.437, ekuitas awal tahun 2019 sebesar Rp 39.041.193.284 dan pada tahun 2020 sebesar Rp 35.359.026.679. Kemudian ekuitas akhir pada Badan Narkotika Nasional Provinsi

Aceh tahun 2018 sebesar Rp 39.041.193.284, tahun 2019 sebesar Rp 35.359.026.679 dan ekuitas akhir pada tahun 2020 sebesar Rp 33.582.142.937. Dapat disimpulkan bahwa laporan perubahan ekuitas pada setiap tahun mengalami peningkatan. Tujuan dari laporan perubahan ekuitas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh yaitu untuk mengetahui saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan saldo anggaran lebih akhir.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

Tujuan laporan operasional Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh yaitu menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan atau laporan keuangan, beban dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya, kemudian mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

Laporan operasional pada BNN Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 4.4
Laporan Operasional pada BNN Provinsi Aceh

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kegiatan Operasional			
2	Pendapatan perpajakan	-	-	-
3	Pendapatan negara bukan pajak	-	-	-
4	Pendapatan hibah	-	-	-
5	Beban	33.283.810.560	37.006.499,728	34.706.392.931
6	Kegiatan non operasional	-	-	-
7	POS luar biasa	-	-	-

Sumber: BNN Provinsi Aceh (2021)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dijelaskan bahwa pendapatan perpajakan, pendapatan hibah dan POS luar biasa pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk tahun 2018 sampai 2020 tidak ada, kemudian pendapatan negara bukan pajak pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh tahun 2018, tahun 2019 dan 2020 pendapatan negara bukan pajak tidak ada. Mengenai beban anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh pada tahun 2018 sebesar Rp 33.283.810.560, tahun 2019 sebesar Rp 37.006.499,728 dan beban pada tahun 2020 sebesar Rp 34.706.392.931. Kegiatan non operasional dinas pada tahun 2018, 2019 dan 2020 tidak ada kegiatan.

4.3 Pembahasan Penerapan Standar Akuntansi Instansi Berbasis Akrua Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan

ekuitas. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan. suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pengguna laporan keuangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut. Laporan Realisasi Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya.

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan

interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

AB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Standar akuntansi instansi berbasis akrual pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh yaitu berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas. Artinya dari tahun 2018 sampai 2020 implementasi Standar akuntansi instansi berbasis akrual pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dapat dilakukan dengan cukup baik.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Pengguna laporan keuangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh mengetahui basis–basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Laporan Realisasi Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

5.2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada aparaturnya Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dapat mengelola laporan keuangan yang sesuai dengan penerapan standar akuntansi berbasis kinerja dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mampu menyusun laporan yang efektif.
2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas ruang lingkup penelitian, mulai dari objek penelitian sampai dengan data responden yang dibutuhkan untuk kelengkapan data. Selain itu, pengukuran *selfefficacy theory* digunakan bisa lebih dari satu faktor yang disesuaikan dengan bahan analisis penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Rahmawati. (2017). Pengaruh Penerapan SAP Terhadap Kewajaran Laporan Kuenagan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Jurnal UNG*, Vol. 1, No. 1
- Akuba, Abdul. M. (2018) *Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo
- Arif. M. (2017). *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso)*. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
- Arikunto, S. (2017). *Prosedur Suatu Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bastian, Indra. (2018). *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dagong, S. (2017). *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Gorontalo (Studi Kasus DPPKAD Kota Gorontalo)*. Skripsi Sarjana Ekonomi UNG
- Defitri, Siska Yulia. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita Vol. 3, No. 1, Hlm 64-75*
- Febriani, R. (2017). Pengaruh Perputaran Kas Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bei Periode 2011-2016. *Artikel Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor*
- Harahap, S. S. (2018). *Teori Akuntansi. Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada
- Hardiyanto, S. (2016). Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Persediaan dan Perputaran Piutang Terhadap Profitabilitas (Studi Empiris Pada Subsektor Makanandan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2013). *Artikel Universitas Telkom*
- Herawati, T. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *STAR-Study & Accounting Research*, XI(1), 1–14.
- Hidayat, Rahmat. (2018). Pengaruh Perputaran Kas Dan Perputaran Piutang Terhadap Tingkat Likuiditas Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Vol. 4, No. 2*

- Hidayatullah (2017). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UISNH Jakarta.
- Hlmim dan Kusufi. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Ihsanti, E. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kab. Lima Puluh Kota). *Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Vol. 1 Nomor. 2, Hlm 1-7*.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), (2017). *Standar Professional Akuntan Publik (SPAP)*, Jakarta: Salemba Empat
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keunagan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Komaruddin, Y. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Penelitian Pada Instansi Pemerintah Kota Bandung). *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia Vol. 1 Nomor. 2, Hlm 1-9*
- Kusuma, Arif Ardi. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya). *Jurnal Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi*
- Lamonisi, Sony (2018) Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2018, Hlm. 223-230*
- Loasoma, V. A. (2017). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo Vol. 1 Nomor. 2, Hlm 1-21*.
- Lubis, F. K. (2017). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Di Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM), Vol. 4. No. 3*.
- Mahmudi. (2018) *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Munawir. (2018). *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.

- Ningtyas, Pravitasari (2016) Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 1*
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71. (2010). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta
- Permendagri No. 13. Tahun 2006 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*).
- Rahmawati (2018) *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo
- Riyanto, Bambang. (2018). *Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaana*. Yogyakarta: BFPE
- Romney, B. M. dan Paul, J. S. (2018). *Accounting Information System*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rosanti, D.I. (2017). Pengaruh Pendidikan, Kompetensi Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT Lati Prayogi. *Jurnal Ilmu & Riset Manajemen Vol. 3 No. 11, Hlm 1-13*
- Sekaran, U. (2017). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Sinarwati, K. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Volume 2 No: 1, Hlm 1-9*
- Skousen. (2018). *Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Soleh, Chabib. (2017). *Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Bandung*. Fokus Media
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta
- Suyanto dan Susila, S. (2016). *Metodologi Penelitian Kesehatan dan Kedokteran*. Yogyakarta: Bursa Ilmu.

Tinangon, Jantje. (2016). Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA Vol.3 No.2, Hlm. 852-862*

Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta

Wati, K. D., Herawati, N. T., & Sinarwati, N. K. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1), 1–11.

Yosefrinaldi. (2018). *Pengaruh kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (Studi Empiris Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.